

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Desentralisasi Fiskal tidak dapat memberikan pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Kemiskinan dapat mengalami penurunan apabila Desentralisasi Fiskal melibatkan peningkatan pada otonomi pemerintah daerah atas pendapatan dan pengeluaran daerah yang penting terhadap pengurangan tingkat Kemiskinan.
2. Pertumbuhan Ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan dari nilai PDRB mampu menurunkan Kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin pada wilayah pedesaan dikatakan masih tinggi, namun secara umum Pertumbuhan Ekonomi yang ada mampu mengentaskan masalah Kemiskinan.
3. Ketimpangan pendapatan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Gini ratio yang rendah menandakan bahwa tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk baik dari golongan atas maupun golongan bawah hampir sama. Pendapatan perkapita terhadap Kemiskinan disebabkan karena Ketimpangan Pendapatan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang mengakibatkan adanya Ketimpangan Pendapatan.

5.2 Saran

1. Pada pelaksanaannya Desentralisasi Fiskal yang mengacu pada otonomi daerah belum terlaksana dengan maksimal, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan perannya dalam meningkatkan Desentralisasi Fiskal untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di setiap daerahnya. Misalnya, mengalokasikan anggaran daerahnya ke belanja modal daerah yang digunakan untuk peningkatan fasilitas publik, seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga dapat berupaya dengan melakukan kemandirian keuangan daerah melalui perbaikan investasi daerah, yang mengarah pada pengoptimalan penerimaan pajak, interaksi pemerintah daerah dan pihak swasta, serta ketenagakerjaan. Sehingga, keadaan ini diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja, kenaikan pendapatan daerah, serta meningkatnya daya beli masyarakat daerah sekitar. Hal ini akan berdampak pada tercapainya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Bali.
2. Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mampu memanfaatkan penyerapan pendapatan dari pajak, retribusi maupun pendapatan asli daerah secara keseluruhan yang kemudian dapat direalisasikan sebagai anggaran penanggulangan Kemiskinan seperti bantuan tunai, maupun program-program pelatihan kerja, serta pinjaman dana atau pemberian dana untuk usaha. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dampak Pertumbuhan Ekonomi secara langsung.